

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subyek Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada perusahaan *Start Up* di Kota Jakarta. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden sebanyak 100 kuesioner dan kembali sebanyak 100. Berikut ini perhitungan tingkat pengembalian kuesioner yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Klasifikasi Kuesioner

No	Kuesioner	Jumlah
1	Kuesioner disebar	100
2	Kuesioner kembali	100
3	Kuesioner yang tidak memenuhi kriteria	0
4	Kuesioner yang dapat dianalisis	100
Response Rate		100%

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan penjelasan dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 100 kuesioner yang disebar pada responden, kuesioner yang kembali sebanyak 100 kuesioner, yang selanjutnya data tersebut akan diolah menggunakan SPSS.

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Pada penelitian ini, responden penelitian berdasarkan usia dibagi kedalam 4 kategori yaitu responden berusia < 25 tahun, responden berusia 25-30 tahun, 31-35 tahun, dan responden berusia >35 tahun. Berikut sajian datanya:

Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Kategori	Frekuensi	Prosentase
< 25 Tahun	12	12.0
25-30 Tahun	52	52.0
31-35 Tahun	23	23.0
> 35 Tahun	13	13.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan umur wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada perusahaan Start Up di Kota Jakarta, sebagian besar adalah responden termasuk dalam kategori 25-30 tahun yaitu sebanyak 52 responden (52,0%).

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

Pada penelitian ini, responden penelitian berdasarkan jenis kelamin, dibagi kedalam 2 kategori yaitu responden laki-laki, dan responden perempuan. Berikut sajian datanya:

Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Laki-Laki	57	57.0
Perempuan	43	43.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada perusahaan Start Up di Kota Jakarta, sebagian besar adalah responden termasuk dalam kategori laki-laki yaitu sebanyak 57 responden (57,0%).

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan.

Pada penelitian ini, responden penelitian berdasarkan pendidikan, dibagi kedalam 3 kategori yaitu responden SMA, S1 dan S2. Berikut sajian datanya:

Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan

Kategori	Frekuensi	Prosentase
SMA	9	9.0
S1	87	87.0
S2	4	4.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan pendidikan wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada perusahaan Start Up di Kota Jakarta, sebagian besar adalah responden termasuk dalam kategori S1 yaitu sebanyak 87 responden (87,0%).

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Status Pernikahan.

Pada penelitian ini, responden penelitian berdasarkan status pernikahan, dibagi kedalam 3 kategori yaitu responden kawin dan belum kawin. Berikut sajian datanya:

Tabel 4.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Status Pernikahan

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Kawin	68	68.0
Belum Kawin	32	32.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan status pernikahan wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada perusahaan Start Up di Kota Jakarta, sebagian besar adalah responden termasuk dalam kategori kawin yaitu sebanyak 68 responden (68,0%).

B. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan data penelitian hasil pengisian kuesioner responden. Analisis dilakukan untuk mengetahui jawaban paling banyak dari pertanyaan dari kuesioner. Nilai distribusi frekuensi dilakukan dengan menggunakan kategori jawaban sebagai berikut:

Sehingga diperoleh batasan persepsi sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Adapun hasil pengujian statistik deskriptif di jabarkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Pajak

Hasil statistik deskriptif setiap butir pertanyaan pengetahuan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Wajib Pajak Yang Memiliki Penghasilan Harus Mendaftarkan Diri Untuk Mendapatkan NPWP

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	9	9.0
Tidak Setuju	34	34.0
Netral	41	41.0
Setuju	13	13.0
Sangat Setuju	3	3.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 41 responden atau 41%.

Tabel 4.7 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Pendaftaran NPWP Dapat Dilakukan Melalui E-Registration Dari Website (Internet)

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	6	6.0
Tidak Setuju	32	32.0
Netral	45	45.0
Setuju	14	14.0
Sangat Setuju	3	3.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui e-registration dari website (internet) bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 45 responden atau 45%.

Tabel 4.8 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Formulir SPT Di Isi Oleh Wajib Pajak Dengan Benar, Lengkap, Dan Jelas

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	7	7.0
Tidak Setuju	33	33.0
Netral	41	41.0
Setuju	19	19.0
Sangat Setuju	0	0.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel formulir SPT di isi oleh wajib pajak dengan benar, lengkap, dan jelas bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 41 responden atau 41%.

Tabel 4.9 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Wajib Pajak Menghitung Serta Membayar Pajak Penghasilan Yang Terutang Dengan Tepat Waktu, Dan Apa Adanya

	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	8	8.0
Tidak Setuju	26	26.0
Netral	48	48.0
Setuju	13	13.0
Sangat Setuju	5	5.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017 6

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel wajib pajak menghitung serta membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu, dan apa adanya bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada

kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 48 responden atau 48%.

Tabel 4.10 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Penentuan Tarif Wajib pajak Menggunakan Pasal 17

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	3	3.0
Tidak Setuju	35	35.0
Netral	41	41.0
Setuju	18	18.0
Sangat Setuju	3	3.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017 7

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel penentuan tarif wajib pajak menggunakan pasal 17 bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 41 responden atau 41%.

Tabel 4.11 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Pajak Yang Dibayarkan Dihitung Berdasarkan Penghasilan Neto Dikurangi PTKP Dan Dikalikan Dengan Tarif Yang Berlaku

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	8	8.0
Tidak Setuju	29	29.0
Netral	42	42.0
Setuju	18	18.0
Sangat Setuju	3	3.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada pajak yang dibayarkan dihitung berdasarkan penghasilan neto dikurangi PTKP dan dikalikan dengan tarif yang berlaku bisa dilihat jawaban responden

terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 42 responden atau 42%.

Tabel 4.12 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Wajib Pajak Memperoleh Pengetahuan Dan Pemahaman Melalui Sosialisasi Dari KPP

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	6	6.0
Tidak Setuju	32	32.0
Netral	41	41.0
Setuju	19	19.0
Sangat Setuju	2	2.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel wajib pajak memperoleh pengetahuan dan pemahaman melalui sosialisasi dari KPP bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 41 responden atau 41%.

Tabel 4.13 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Wajib Pajak Memperoleh Peraturan Pajak Dari Training

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	8	8.0
Tidak Setuju	35	35.0
Netral	37	37.0
Setuju	16	16.0
Sangat Setuju	4	4.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel wajib pajak memperoleh peraturan pajak dari training bisa dilihat jawaban responden

terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 37 responden atau 37%.

2. Sanksi Pajak

Hasil statistik deskriptif setiap butir pertanyaan sanksi pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Pengenaan Sanksi Dalam SPT Sangat Diperlukan

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	11	11.0
Tidak Setuju	31	31.0
Netral	34	34.0
Setuju	19	19.0
Sangat Setuju	5	5.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel pengenaan sanksi dalam SPT sangat diperlukan bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 34 responden atau 34%.

Tabel 4.15 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Denda Dengan Nominal Rp. 1.000.000,00 Adalah Denda Yang Wajar

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	8	8.0
Tidak Setuju	33	33.0
Netral	35	35.0
Setuju	18	18.0
Sangat Setuju	6	6.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel denda dengan nominal Rp. 1.000.000,00 adalah denda yang wajar bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 35 responden atau 35%.

Tabel 4.16 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Apabila SPT Dilakukan Dengan Salah, Maka Berlaku Sanksi Administrasi Denda Sebesar 50% Dari Pajak Kurang Bayar

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	9	9.0
Tidak Setuju	34	34.0
Netral	34	34.0
Setuju	15	15.0
Sangat Setuju	8	8.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel apabila SPT dilakukan dengan salah, maka berlaku sanksi administrasi denda sebesar 50% dari pajak kurang bayar bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Tidak Setuju” dan “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 34 responden atau 34%.

Tabel 4.17 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Wajib Pajak Yang Terlambat Melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Terkena Denda Sebesar Rp. 100.000,-

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	9	9.0
Tidak Setuju	33	33.0
Netral	33	33.0
Setuju	19	19.0
Sangat Setuju	6	6.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan terkena denda sebesar Rp. 100.000,- bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Tidak Setuju” dan “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 33 responden atau 33%.

Tabel 4.18 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Wajib Pajak Membayar Kekurangan Pajak Penghasilan Sebelum Dilakukan Pemeriksaan Dari Aparat Pajak

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	9	9.0
Tidak Setuju	39	39.0
Netral	30	30.0
Setuju	16	16.0
Sangat Setuju	6	6.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel wajib pajak membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Tidak Setuju”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 39 responden atau 39%.

Tabel 4.19 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Mengisi SPT Sesuai Peraturan Yang Berlaku

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	7	7.0
Tidak Setuju	36	36.0
Netral	31	31.0
Setuju	18	18.0
Sangat Setuju	8	8.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel mengisi SPT sesuai peraturan yang berlaku bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Tidak Setuju”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 36 responden atau 36%.

Tabel 4.20 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Melakukan Evaluasi Secara Berkala Untuk Mengurangi Kemungkinan Pemeriksaan Dari Aparat

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	6	6.0
Tidak Setuju	39	39.0
Netral	29	29.0
Setuju	21	21.0
Sangat Setuju	5	5.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel melakukan evaluasi secara berkala untuk mengurangi kemungkinan pemeriksaan dari aparat bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Tidak Setuju”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 39 responden atau 39%.

3. Kesadaran Wajib Pajak

Hasil statistik deskriptif setiap butir pertanyaan kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Pajak Bersifat Memaksa Dan Sudah Distur Didalam UU

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	3	3.0
Tidak Setuju	30	30.0
Netral	46	46.0
Setuju	15	15.0
Sangat Setuju	6	6.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel pajak bersifat memaksa dan sudah distur didalam UU bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 46 responden atau 46%.

Tabel 4.22 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Pajak Menjadi Bentuk Pengabdian Masyarakat Terhadap Negara

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	0	0.0
Tidak Setuju	36	36.0
Netral	44	44.0
Setuju	16	16.0
Sangat Setuju	4	4.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel pajak menjadi bentuk pengabdian masyarakat terhadap negara bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 44 responden atau 44%.

Tabel 4.23 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Membayar Pajak Merupakan Bentuk Partisipasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Negara

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	1	1.0
Tidak Setuju	34	34.0
Netral	44	44.0
Setuju	16	16.0
Sangat Setuju	5	5.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam rangka menunjang pembangunan negara bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 44 responden atau 44%.

Tabel 4.24 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Pajak Yang Dibayarkan Secara Tertunda Dan Kurang, Akan Merugikan Negara

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	1	1.0
Tidak Setuju	34	34.0
Netral	46	46.0
Setuju	16	16.0
Sangat Setuju	3	3.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel pajak yang dibayarkan secara tertunda dan kurang, akan merugikan negara bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa

diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 46 responden atau 46%.

Tabel 4.25 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Pajak Yang Dibayarkan Tidak Sesuai Akan Berakibat Pada Kerugian Yang Ditanggung Negara

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	1	1.0
Tidak Setuju	34	34.0
Netral	44	44.0
Setuju	15	15.0
Sangat Setuju	6	6.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel pajak yang dibayarkan tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang ditanggung negara bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 44 responden atau 44%.

Tabel 4.26 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Membayar Pajak Adalah Bentuk Kesejahteraan Rakyat

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	2	2.0
Tidak Setuju	29	29.0
Netral	45	45.0
Setuju	19	19.0
Sangat Setuju	5	5.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel membayar pajak adalah bentuk kesejahteraan rakyat bisa dilihat jawaban responden

terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 45 responden atau 45%.

Tabel 4.26 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Masyarakat Mendaftar Sebagai Wajib Pajak Tanpa Paksaan

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	0	0.0
Tidak Setuju	37	37.0
Netral	41	41.0
Setuju	14	14.0
Sangat Setuju	8	8.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel masyarakat mendaftar sebagai wajib pajak tanpa paksaan bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 41 responden atau 41%.

Tabel 4.27 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Hak Dan Kewajiban Pajak Dilaksanakan Sesuai Peraturan Yang Berlaku

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	2	2.0
Tidak Setuju	32	32.0
Netral	46	46.0
Setuju	16	16.0
Sangat Setuju	4	4.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel hak dan kewajiban pajak dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa

diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 46 responden atau 46%.

Tabel 4.28 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Aparat Pajak Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	1	1.0
Tidak Setuju	35	35.0
Netral	42	42.0
Setuju	17	17.0
Sangat Setuju	5	5.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat pajak meningkatkan kesadaran membayar pajak bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 42 responden atau 42%.

Tabel 4.29 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Sosialisasi Pajak Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	3	3.0
Tidak Setuju	33	33.0
Netral	44	44.0
Setuju	16	16.0
Sangat Setuju	4	4.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel sosialisasi pajak meningkatkan kesadaran membayar pajak bisa dilihat jawaban

responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 44 responden atau 44%.

Tabel 4.30 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Rasa Tanggung Jawab Wajib Pajak Sebagai Warga Negara Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	0	0.0
Tidak Setuju	33	33.0
Netral	50	50.0
Setuju	11	11.0
Sangat Setuju	6	6.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel rasa tanggung jawab wajib pajak sebagai warga negara mempengaruhi kesadaran membayar pajak bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 50 responden atau 50%.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil statistik deskriptif setiap butir pertanyaan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.31 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Saya Melakukan Pembukuan Dan Pencatatan Dengan Benar

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	5	5.0
Tidak Setuju	36	36.0
Netral	30	30.0
Setuju	18	18.0
Sangat Setuju	11	11.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel saya melakukan pembukuan dan pencatatan dengan benar bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Tidak Setuju”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 36 responden atau 36%.

Tabel 4.32 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Saya Menghitung SPT Pajak Terutang Dengan Benar Dalam SPT Mas Dan Tahunan

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	4	4.0
Tidak Setuju	26	26.0
Netral	46	46.0
Setuju	13	13.0
Sangat Setuju	11	11.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel saya menghitung SPT pajak terutang dengan benar dalam SPT mas dan tahunan bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 46 responden atau 46%.

Tabel 4.33 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Saya Mengisi SSP Dengan Benar, Dan Sesuai Dengan Hitungan Fiskus

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	2	2.0
Tidak Setuju	32	32.0
Netral	35	35.0
Setuju	17	17.0
Sangat Setuju	14	14.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel saya mengisi SSP dengan benar, dan sesuai dengan hitungan fiskus bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 35 responden atau 35%.

Tabel 4.34 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Saya Selalu Melaporkan SPT Dan Menyetor Secara Tepat Waktu Setiap Bulan

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	4	4.0
Tidak Setuju	27	27.0
Netral	42	42.0
Setuju	13	13.0
Sangat Setuju	14	14.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel saya selalu melaporkan SPT dan menyetor secara tepat waktu setiap bulan bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 42 responden atau 42%.

Tabel 4.35 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Saya Tepat Waktu Setiap Tahun Menyampaikan SPT

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	3	3.0
Tidak Setuju	31	31.0
Netral	36	36.0
Setuju	16	16.0
Sangat Setuju	14	14.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel saya tepat waktu setiap tahun menyampaikan SPT bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 36 responden atau 36%.

Tabel 4.36 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Saya Bersedia Memenuhi Tunggakan Pajak Jika Ada

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	3	3.0
Tidak Setuju	34	34.0
Netral	38	38.0
Setuju	15	15.0
Sangat Setuju	10	10.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel saya bersedia memenuhi tunggakan pajak jika ada bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 38 responden atau 38%.

Tabel 4.37 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Saya Akan Membantu Kelancaran Proses Pemeriksaan Pajak

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	4	4.0
Tidak Setuju	25	25.0
Netral	41	41.0
Setuju	18	18.0
Sangat Setuju	12	12.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel saya akan membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 41 responden atau 41%.

Tabel 4.38 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Saya Akan Memberikan Data Yang Diperlukan Saat Pemeriksaan

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	4	4.0
Tidak Setuju	29	29.0
Netral	41	41.0
Setuju	13	13.0
Sangat Setuju	13	13.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel saya akan memberikan data yang diperlukan saat pemeriksaan bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 41 responden atau 41%.

Tabel 4.39 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Saya Masih Merasa Takut Dengan Hal Yang Berhubungan Dengan Pemeriksaan Pajak

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	2	2.0
Tidak Setuju	32	32.0
Netral	40	40.0
Setuju	14	14.0
Sangat Setuju	12	12.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel saya masih merasa takut dengan hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 40 responden atau 40%.

Tabel 4.40 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Wajib Pajak Bersedia Menyiapkan Dokumen Yang Diperlukan

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	4	4.0
Tidak Setuju	38	38.0
Netral	33	33.0
Setuju	17	17.0
Sangat Setuju	8	8.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel wajib pajak bersedia menyiapkan dokumen yang diperlukan bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Tidak Setuju”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 38 responden atau 38%.

5. Kemauan Membayar Pajak

Hasil statistik deskriptif setiap butir pertanyaan kemauan membayar pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.41 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Wajib Pajak Bersedia Menyiapkan Dokumen Yang Diperlukan

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	4	4.0
Tidak Setuju	38	38.0
Netral	33	33.0
Setuju	17	17.0
Sangat Setuju	8	8.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel wajib pajak bersedia menyiapkan dokumen yang diperlukan bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Tidak Setuju”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 38 responden atau 38%.

Tabel 4.42 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Wajib Pajak Mencari Informasi Dimana Tempat Membayar Pajak Dan Cara Membayarnya

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	0	0.0
Tidak Setuju	29	29.0
Netral	44	44.0
Setuju	18	18.0
Sangat Setuju	9	9.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel wajib pajak mencari informasi dimana tempat membayar pajak dan cara membayarnya bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 44 responden atau 44%.

Tabel 4.43 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Wajib Pajak Mencari Informasi Tentang Batas Akhir Membayar Pajak

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	4	4.0
Tidak Setuju	35	35.0
Netral	34	34.0
Setuju	17	17.0
Sangat Setuju	10	10.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel wajib pajak mencari informasi tentang batas akhir membayar pajak bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Tidak Setuju”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 35 responden atau 35%.

Tabel 4.44 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Wajib Pajak Melakukan Konsultasi Sebelum Membayar Pajak Dengan Pihak Yang Memahami Pajak

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	0	0.0
Tidak Setuju	30	30.0
Netral	44	44.0
Setuju	17	17.0
Sangat Setuju	9	9.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel wajib pajak melakukan konsultasi sebelum membayar pajak dengan pihak yang memahami pajak bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada

kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 44 responden atau 44%.

Tabel 4.45 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Wajib Pajak Harus Mendaftarkan Diri Untuk Mendapatkan NPWP

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	0	0.0
Tidak Setuju	29	29.0
Netral	43	43.0
Setuju	17	17.0
Sangat Setuju	11	11.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 43 responden atau 43%.

Tabel 4.46 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Wajib Pajak Menyampaikan SPT Tanpa Paksaan

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	2	2.0
Tidak Setuju	34	34.0
Netral	38	38.0
Setuju	16	16.0
Sangat Setuju	10	10.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel wajib pajak menyampaikan SPT tanpa paksaan bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 38 responden atau 38%.

Tabel 4.47 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Wajib Pajak Mengalokasikan Dana Untuk Membayar Pajak

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	2	2.0
Tidak Setuju	31	31.0
Netral	38	38.0
Setuju	19	19.0
Sangat Setuju	10	10.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel wajib pajak mengalokasikan dana untuk membayar pajak bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 38 responden atau 38%.

Tabel 4.48 Hasil Analisis Tabulasi Sederhana Wajib Pajak Membayar Pajak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	4	4.0
Tidak Setuju	33	33.0
Netral	38	38.0
Setuju	16	16.0
Sangat Setuju	9	9.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer 2017

Dari hasil tabel analisis tabulasi sederhana pada variabel wajib pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku bisa dilihat jawaban responden terkonsentrasi pada kategori “Netral”, dan bisa diketahui bahwa atribut mayoritas menjawab sebanyak 38 responden atau 38%.

C. Hasil Uji Kualitas Instrumen

1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur tepat mengukur obyek yang diteliti. Valid atau tidaknya suatu instrumen dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi *product moment person* dengan level signifikansi 5%. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%), maka dinyatakan valid dan sebaliknya apabila signifikansi hasil korelasi lebih besar dari 0,05 (5%) maka dinyatakan tidak valid.

Tabel 4.49 Hasil Uji Validitas dari Item – Item Variabel Penelitian

Variabel	Item Pertanyaan	Sig	Keterangan
Pengetahuan Pajak	X1.1	0,000	Valid
	X1.2	0,000	Valid
Sanksi Pajak	X1.3	0,000	Valid
	X1.4	0,000	Valid
	X1.5	0,000	Valid
	X1.6	0,000	Valid
	X1.7	0,000	Valid
	X1.8	0,000	Valid
	X2.1	0,000	Valid
	X2.2	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X2.3	0,000	Valid
	X2.4	0,000	Valid
	X2.5	0,000	Valid
	X2.6	0,000	Valid
	X2.7	0,000	Valid
	X3.1	0,000	Valid
	X3.2	0,000	Valid
	X3.3	0,000	Valid
	X3.4	0,000	Valid
	X3.5	0,000	Valid
	X3.6	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	X3.7	0,000	Valid
	X3.8	0,000	Valid
	X3.9	0,000	Valid
	X3.10	0,000	Valid
	X3.11	0,000	Valid
	Y.1	0,000	Valid
	Y.2	0,000	Valid
	Y.3	0,000	Valid
	Y.4	0,000	Valid
	Y.5	0,000	Valid
	Y.6	0,000	Valid
Kemauan Membayar Pajak	Y.7	0,000	Valid
	Y.8	0,000	Valid
	Y.9	0,000	Valid
	Z.1	0,000	Valid
	Z.2	0,000	Valid
	Z.3	0,000	Valid
	Z.4	0,000	Valid
	Z.5	0,000	Valid
Z.6	0,000	Valid	
	Z.7	0,000	Valid
	Z.8	0,000	Valid

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua item-item pertanyaan dari setiap variabel valid karena memiliki level signifikansi lebih kecil dari 0,05. Oleh karenanya item-item tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah jawaban seorang responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas adalah dengan nilai *Cronbach Alpha*, jika semakin tinggi mendekati angka 1 maka semakin tinggi nilai konsistensi internal reliabilitasnya. Jika nilai *Cronbach Alpha* diatas $\geq 0,6$ maka reliabilitas diterima.

Tabel 4.50
Hasil Uji Reliabilitas Item – Item Variabel Penelitian

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	0,968	Reliabel
Sanksi Pajak	0,973	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,972	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,981	Reliabel
Kemauan Membayar Pajak	0,978	Reliabel

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan penjelasan tabel diatas menunjukkan bahwa item pertanyaan Pengetahuan Wajib Pajak (X_1), Sanksi Pajak (X_2), Kesadaran Wajib Pajak (X_3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Kemauan Membayar Pajak (Z), dinyatakan reliabel.

D. Uji Kualitas Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji, apakah model regresi yang digunakan penelitian ini layak diuji atau tidak. Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa multikolinearitas, heteroskedasitas

tidak terdapat dalam penelitian ini dan data berdistribusi normal. Jika keseluruhan syarat tersebut terpenuhi, berarti bahwa model analisis telah layak digunakan (Gujarti, 2012). Uji penyimpangan asumsi klasik dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji ini adalah untuk menguji apakah pengamatan berdistribusi secara normal atau tidak, uji ini menggunakan kolmogorov smirnov.

Hasil uji Normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.51 Hasil Uji Normalitas

Variabel	sig	batas	Keterangan
Persamaan 1	0.405	>0,05	Normal
Persamaan 2	0.270	>0,05	Normal

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan Tabel 4.51 dapat diketahui nilai *asympt.sig* sebesar 0,405 dan 0,270 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Suatu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.52 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Keterangan	Variabel	Sig	Batas	Keterangan
Persamaan 1	Pengetahuan Wajib Pajak	0.188	>0,05	Normal
	Sanksi Pajak	0.611	>0,05	Normal
	Kesadaran Wajib Pajak	0.216	>0,05	Normal
Persamaan 2	Pengetahuan Wajib Pajak	0.914	>0,05	Normal
	Sanksi Pajak	0.100	>0,05	Normal
	Kesadaran Wajib Pajak	0.778	>0,05	Normal
	Kepatuhan Wajib Pajak	0.158	>0,05	Normal

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4.52 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 5%, dengan demikian variabel yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi heterokedasitas.

c. Uji Multikolineartias

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance* (α).

Tabel 4.52 Hasil Uji Multikolineartias

Keterangan	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Persamaan 1	Pengetahuan Wajib Pajak	0.308	3.243	Tidak terjadi multikolinieritas
	Sanksi Pajak	0.224	4.455	Tidak terjadi multikolinieritas
	Kesadaran Wajib Pajak	0.260	3.849	Tidak terjadi multikolinieritas
Persamaan 2	Pengetahuan Wajib Pajak	0.271	3.687	Tidak terjadi multikolinieritas
	Sanksi Pajak	0.204	4.895	Tidak terjadi multikolinieritas
	Kesadaran Wajib Pajak	0.248	4.038	Tidak terjadi multikolinieritas
	Kepatuhan Wajib Pajak	0.268	3.729	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4.52 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance value* $> 0,10$ atau nilai *VIF* < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

E. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji Analisis Jalur (*Path Analysis*)

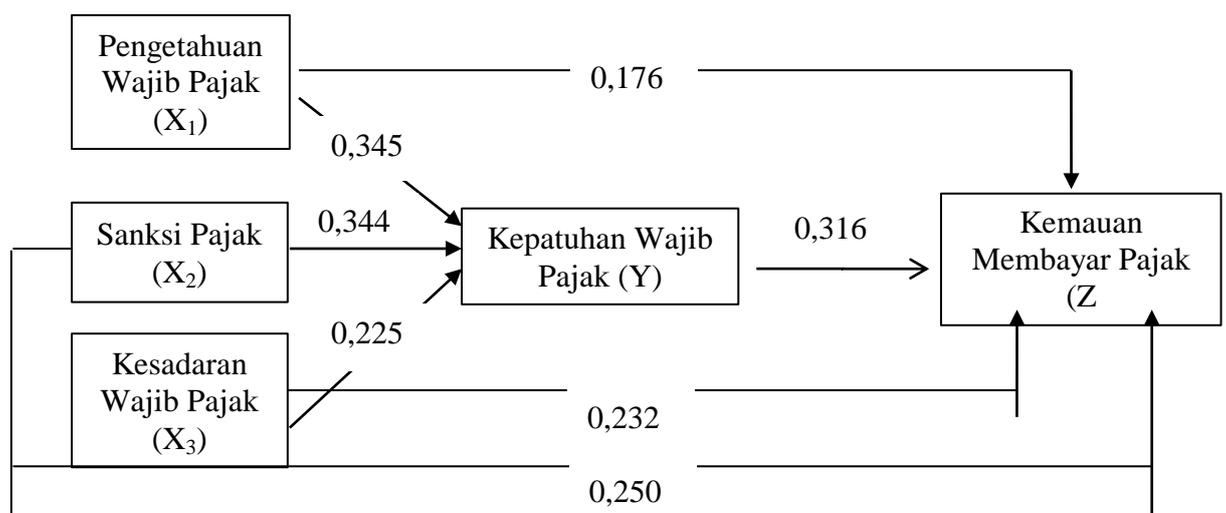
Uji koefisien path pada setiap jalur pengaruh langsung adalah sama dengan regresi menggunakan nilai p dari uji t, yaitu pengujian koefisien regresi variable dibakukan secara parsial. Penjabaran hasil koefisien regresinya pada table berikut ini:

Tabel 4.53 Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel Bebas	Variabel terikat	Beta	t hitung	Sig.
Pengetahuan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	0.345	3.623	0.000
Sanksi Pajak		0.344	3.081	0.003
Kesadaran Wajib Pajak		0.225	2.166	0.033
Pengetahuan Wajib Pajak	Kemauan Membayar Pajak	0.176	2.053	0.043
Sanksi Pajak		0.250	2.533	0.013
Kesadaran Wajib Pajak		0.232	2.584	0.011
Kepatuhan Wajib Pajak		0.316	3.664	0.000

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan hasil regresi di atas dapat digambarkan diagram jalur yang terbentuk adalah sebagai berikut:



Dari koefisien path yang dihasilkan menggambarkan variable

Gambar 4.1 Diagram Hasil Regresi

wajib

pajak mempunyai pengaruh langsung terhadap kemauan membayar pajak maupun kepatuhan wajib pajak karena nilai ($p < 0,05$). Koefisien path bertanda positif yang berarti semakin baik pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak yang didapatkan mahasiswa akan meningkatkan kemauan membayar pajak maupun kepatuhan wajib pajak.

2. Uji Secara Tidak Langsung

a. Pengaruh Tidak Langsung Antara Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Melalui Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Dengan Membandingkan Nilai Koefisien Regresi.

Berikut ini adalah nilai koefisien regresi untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak mampu memediasi pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak dengan cara mengalikan nilai koefisien antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien kepatuhan wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak dan hasil dari perkalian koefisien tersebut dibandingkan dengan nilai koefisien dari pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak, hasilnya sebagai berikut :

- 1) Koefisien Regresi pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak sebesar 0,176
- 2) Koefisien Regresi pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,345

3) Koefisien Regresi kepatuhan wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak sebesar 0,316

$$0,345 \times 0,316 = 0,10902$$

Dari hasil perkalian diatas dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien regresi pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak sebesar 0,176 sedangkan nilai koefisien pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel *intervening* sebesar 0,10902 yang artinya kepatuhan wajib pajak tidak mampu memediasi antara pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak dikarenakan nilai koefisien lebih kecil daripada pengaruh langsung.

b. Pengaruh Tidak Langsung Antara Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Melalui Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Dengan Membandingkan Nilai Koefisien Regresi.

Berikut ini adalah nilai koefisien regresi untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak mampu memediasai sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak dengan cara mengkalikan nilai koefisien antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien kepatuhan wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak dan hasil dari perkalian koefisien tersebut dibandingkan dengan nilai koefisien dari sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak, hasilnya sebagai berikut:

- 1) Koefisien Regresi sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak sebesar 0,250
 - 2) Koefisien Regresi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,344
 - 3) Koefisien Regresi kepatuhan wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak sebesar 0,316
- $$0,344 \times 0,316 = 0,108704$$

Dari hasil perkalian diatas dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien regresi sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak sebesar 0,250 sedangkan nilai koefisien sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel *intervening* sebesar 0,108704 yang artinya kepatuhan wajib pajak tidak mampu memediasi antara sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak dikarenakan nilai koefisien lebih kecil daripada pengaruh langsung.

c. Pengaruh Tidak Langsung Antara Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Melalui Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Dengan Membandingkan Nilai Koefisien Regresi.

Berikut ini adalah nilai koefisien regresi untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak mampu memediasai kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak dengan cara mengalikan nilai koefisien antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien kepatuhan wajib pajak terhadap kemauan

membayar pajak dan hasil dari perkalian koefisien tersebut dibandingkan dengan nilai koefisien dari kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak, hasilnya sebagai berikut :

- 1) Koefisien Regresi kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak sebesar 0,232
- 2) Koefisien Regresi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,225
- 3) Koefisien Regresi kepatuhan wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak sebesar 0,316

$$0,225 \times 0,316 = 0,0711$$

Dari hasil perkalian diatas dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak sebesar 0,232 sedangkan nilai koefisien kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel *intervening* sebesar 0,0711 yang artinya kepatuhan wajib pajak tidak mampu memediasi antara kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak dikarenakan nilai koefisien lebih kecil daripada pengaruh langsung.

Kesimpulan penerimaan atau penolakan hipotesis penelitian tampak pada table berikut:

Tabel 4.20 Rekap Penerimaan Atau Penolakan Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Keterangan
H1: Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Diterima
H2: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Diterima
H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Diterima
H4: Pengetahuan berpengaruh positif terhadap Kemauan membayar Pajak	Diterima
H5: Sanksi berpengaruh positif terhadap Kemauan membayar Pajak	Diterima
H6: Kesadaran berpengaruh positif terhadap Kemauan membayar Pajak	Diterima
H7: Kepatuhan berpengaruh positif terhadap Kemauan membayar Pajak	Diterima

F. Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 3,623 dengan probabilitas 0,000 dimana angka tersebut signifikan karena ($p < 0,05$).

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Setyawati, 2013).

Pengetahuan pajak sangat erat hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak, semakin baik tingkat pengetahuan masyarakat tentang pajak maka secara tidak langsung kepatuhan pajak akan baik. Menurut Siti Kurnia (2010:29) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang

memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajibannya perpajakannya.

Pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya (Suhayati, 2010).

Memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan sesuatu Negara yang dianggap adil. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalu pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Rustiyaningih, 2011).

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Supriyati (2008) menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa pengetahuan peraturan

perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 3,081 dengan probabilitas 0,003 dimana angka tersebut signifikan karena ($p < 0,05$).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak (Mardiasmo, 2008).

Pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat telat dalam membayar pajak (Marisa, 2013).

Wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi akibat telat dalam membayar pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik

administrasi (denda, bunga, kenaikan) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Tryana, 2013).

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Oktaviane (2013) menunjukkan bahwa sanksi mempengaruhi positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang berat akan membuat wajib pajak taat dalam membayar pajak.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,166 dengan probabilitas 0,033 dimana angka tersebut signifikan karena ($p < 0,05$).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Supadmi, 2010).

Menurut Liana Ekawati (2009) menyatakan bahwa Wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksana fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban pajak secara cepat waktu dan tepat jumlahnya. Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing-masing, baik dari pengamatan dari orang lain maupun pengalaman pribadi. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi (Suardika, 2010).

Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Irianto (2010) menyatakan bahwa hasil penelitian kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan kesadaran perpajakan hanya akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menyetorkan nominal pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tersebut.

4. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,053 dengan probabilitas 0,043 dimana angka tersebut signifikan karena ($p < 0,05$).

Pengetahuan peraturan perpajakan merupakan penalaran serta penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Maksud dari mengerti dan paham tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) meliputi bagaimana melakukan pembayaran, tempat pembayaran, menyampaikan SPT, denda dan batas waktu pembayaran dan penyampaian SPT (Hardiningsih, 2011).

Wajib pajak yang tidak mempunyai pengetahuan akan peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, maka semakin tahu pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. wajib pajak yang telah mengetahui peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan (Machogu, 2013).

Pengetahuan peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor internal dari teori atribusi, faktor ini penting agar para wajib pajak mau membayar pajak terhutangnya dengan baik dan benar. Pengetahuan pajak merupakan sesuatu yang penting dimiliki oleh wajib pajak (Masinambow, 2013).

Wajib pajak yang paham terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakannya. Apabila tidak adanya pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan maka para wajib pajak pasti akan kebingungan untuk mengetahui bagaimana cara membayar pajak yang baik dan benar (Poli, 2015).

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Sukma (2015), menemukan hasil pengetahuan yang baik semakin baik tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini yang membuat wajib pajak mau membayar pajak sesuai yang telah ditentukan.

5. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2.533 dengan probabilitas 0,013 dimana angka tersebut signifikan karena ($p < 0,05$).

Selama ini ada anggapan dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi hanya jika tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau Wajib Pajak terkena sanksi, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Secara umum ada dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif (Nugroho, 2012).

Menurut Desy Anggraeni (2011) sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman. Namun pemberian imbalan apabila Wajib Pajak patuh dan telah memasukan surat pemberitahuan tepat pada waktunya. Dirjen pajak sekarang berfokus pada pemberian sanksi negatif kepada Wajib Pajak supaya Wajib Pajak patuh terhadap peraturan perpajakan.

Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajak apabila sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Apabila Wajib Pajak lebih banyak sisa tunggakan pajak yang seharusnya dibayar, maka akan semakin berat untuk Wajib Pajak untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan Wajib Pajak terhadap sanksi denda akan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak (Supadmi, 2008).

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi (2009) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini akan memenuhi kewajiban pajaknya dikarenakan adanya Sanksi Pajak yang akan diberikan jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya.

6. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2.584 dengan probabilitas 0,011 dimana angka tersebut signifikan karena ($p < 0,05$).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak (Widayati, 2007).

Vanessa dan Hari (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak

yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Ketika seseorang memiliki kesadaran betapa pentingnya membayar pajak, maka akan timbul niat untuk membayar pajak. Jadi, niat tumbuh karena diikuti oleh kesadaran tersebut (Sari, 2013).

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Putri (2012) mengatakan bahwa faktor kesadaran perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran wajib pajak akan lebih patuh dalam menunaikan kewajiban pajak

7. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal tersebut

terbukti dengan nilai t hitung sebesar 3.664 dengan probabilitas 0,000 dimana angka tersebut signifikan karena ($p < 0,05$).

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Istanto, 2010).

Menurut Wahyu Santoso (2008) Kepatuhan Wajib Pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakanya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Wajib pajak yang patuh terhadap pajak bisa dikatakan sudah mempunyai keinginan yang besar dalam membayar pajak. Hal ini membuat kepatuhan sangat erat hubunganya dengan kemauan membayar pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin baik kemauan untuk membayar pajak (Togler, 2008).

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Komariah (2011) menyatakan bahwa kepatuhan menjadi pendorong utama motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Karena semakin tinggi Kepatuhan Wajib

pajak, maka penerimaan kantor pajak pertama akan meningkat. Artinya kemauan membayar pajak masyarakat juga meningkat.